

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses kemajuan dan perbaikan yang secara terus menerus menuju pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan yang ingin di capai adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil. Dalam mencapai tujuan tersebut maka seluruh potensi dan sumber daya pembangunan yang ada dialokasikan secara efektif dan efisien guna meningkatkan produksi secara keseluruhan. Pembangunan suatu daerah sangat di tentukan oleh sumber daya yang di miliki oleh daerah terutama sumber pendapatan daerah yang berguna untuk menutupi pembiayaan yang diperlukan bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya.

Sejak tanggal 1 Januari Tahun 2000 pelaksanaan desentralisasi fiskal di indonesia secara resmi mulai dilaksanakan. Dua Undang-undang (UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah) telah di keluarkan untuk mengatur pelaksanaan desentralisasi. Kedua Undang-undang tersebut diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, yang berarti bahwa pemerintah daerah mempunyai peranan yang lebih penting dan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya dan memajukan daerah dibandingkan dengan sistem sentralisasi.

Pemberian otonomi kepada daerah menimbulkan hak, wewenang dan kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengalokasikan anggaran daerah sesuai dengan kebutuhan daerah, serta untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan. Berkenaan dengan hal itu, maka desentralisasi diharapkan dapat mendorong dan mempercepat proses pembangunan yang berpihak kepada kelompok miskin dan menyediakan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk membantu pemerintahan pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya (*Davey,1988 dan Hirawan,1991*). Disamping itu, tujuan lain dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan.

Sejalan dengan pemberian otonomi daerah dan pelaksanaan azas desentralisasi, maka subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat pun mengalami penurunan. Hal ini berarti daerah diberi wewenang dan tugas untuk merencanakan, menggali dan mengupayakan potensi dan sumber keuangan sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu pemerintah daerah betul-betul di tuntut agar mampu membiayai operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, maka masing-masing pemerintah kota dan kabupaten perlu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) nya.

Kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui tentang kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu PAD suatu daerah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*Bratakusuma, 2003*)

Indicator yang ikut mempengaruhi penerimaan PAD yang juga menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah adalah PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah/daerah tersebut dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumber daya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah. (*sukirno,1997*)

Pengeluaran Pemerintah juga merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan DPRD harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan APBD yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain

adalah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBD nya mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. (Uppal,1996)

Menurut (Todaro,1997:105), faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari suatu negara atau masyarakat yaitu pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional telah dianggap positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Namun demikian kesemuanya tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan tambahan pekerja itu secara produktif.

Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Bila dilihat dari perkembangan PAD di Provinsi Sumatra Barat ternyata mengalami peningkatan. Pada tahun 2002 PAD Sumatera Barat adalah Rp 213.254 juta, Sedangkan pada tahun 2003 PAD Sumatra Barat adalah Rp 281.450,71 juta. Ini berarti

mengalami peningkatan sebesar Rp 68.196,71 juta atau sekitar 31,98 % dari tahun 2002 ke tahun 2003. Indikator yang diperkirakan ikut berpengaruh terhadap PAD Provinsi SUMBAR adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam periode yang sama, PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2002 yaitu Rp 8.505.562,84 juta selanjutnya pada tahun 2003 menjadi Rp 8.886.573,12 juta dengan peningkatan sebesar 4,48%. (*BPS Provinsi Sumatra Barat, 2002-2003*).

Selain PDRB atas dasar harga konstan, variable lain yang diyakini ikut mempengaruhi penerimaan (Pendapatan Asli Daerah) PAD SUMBAR adalah Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk. Untuk Pengeluaran Pemerintah, pada tahun 2002 adalah Rp 492.408,17 juta selanjutnya pada tahun 2003 sebesar Rp537.305,12 juta. Berarti terjadi peningkatan sebesar 9,11% dari tahun 2002 ke tahun 2003. Begitu pula untuk Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2002- 2003. Jumlah Penduduk juga mengalami peningkatan dari 4.389.969 jiwa pada tahun 2002 menjadi 4.468.912 jiwa pada tahun 2003 dengan peningkatan sebesar 1,79%. (*BPS Provinsi Sumatra Barat, 2002-2003*).

Sama halnya dengan Provinsi Sumatera Barat, ternyata PAD kota Pariaman juga mengalami peningkatan sebesar Rp1.124,12 juta pada tahun 2002 menjadi Rp 1.217,37 juta pada tahun 2003 yang berarti terjadi peningkatan sebesar 8.3% pada tahun 2000-2003. Untuk PDRB atas dasar harga konstan kota Pariaman, penerimaannya juga mengalami peningkatan, Pada tahun 2002 PDRB kota Pariaman adalah sebesar Rp 484.621 juta selanjutnya pada tahun 2003 sebesar Rp 509.106 juta. Ini berarti PAD kota Pariaman mengalami peningkatan sebesar 5.05% dari tahun 2002 ke tahun 2003. Untuk Pengeluaran Pemerintah kota Pariaman, pada tahun 2002 menyumbang sebesar

Rp.47.955.55 juta selanjutnya sebesar Rp 50.297.11 juta pada tahun 2003, terjadi peningkatan sebesar 4,88% dari tahun 2002 ke tahun 2003. (*BPS Kota Pariaman, 2002-2003*)

Dari segi pertumbuhan penduduknya, Kota Pariaman mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan rata-ratanya adalah sebesar 1,54 % dari tahun 2002 sampai tahun 2003, yaitu dengan jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 72.339 jiwa menjadi sebesar 73.456 jiwa pada tahun 2003. (*BPS, Kota Pariaman dalam angka 2002-2003*)

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, apakah memang benar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Penduduk, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PARIAMAN TAHUN 2002-2011”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka perumusan masalah yang dapat diuraikan sebagai dasar penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pariaman Tahun 2002-2011 ?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pariaman Tahun 2002-2013 ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Pariaman Tahun 2002-2011 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pariaman Tahun 2002-2011.
2. Menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pariaman Tahun 2002-2011.
3. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pariaman Tahun 2002-2011.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk pemerintah, tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan menyangkut penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi penulis, tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas serta menambah wawasan penulis dalam pembuatan karya ilmiah.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji masalah yang sama dengan penelitian ini.

1.5 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pariaman dengan periode waktu dari tahun 2002-2011 (time series). Data diperoleh dari BPS Kota Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat serta Dinas terkait. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang telah disusun oleh lembaga, badan atau dinas tersebut di atas.

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh PDRB, pengaruh Pengeluaran Pemerintah, dan pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pariaman Tahun 2002-2011.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini disajikan konsep- konsep dasar teori yang ada kaitannya dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta juga menjelaskan beberapa studi sebelumnya yang penulis amati yang kemudian disusun suatu hipotesis dalam penelitian yang merupakan jawaban sementara atas RumusanMasalah.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN.

Bab ini berisi tentang metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan sebagai sumber. Selain itu, Bab ini juga berisi teori pengujian model penelitian yang akan digunakan.

Bab IV GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan mengenai keadaan Geografis, Penduduk dan Luas Wilayah, Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perkembangan PDRB, Perkembangan Pengeluaran Pemerintah serta Perkembangan Jumlah Penduduk.

Bab V HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini dibahas Penemuan Empiris dan Uji Asumsi Klasik serta Implikasi Kebijakan.

Bab VI PENUTUP DAN KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penemuan empiris dan saran-saran bagi pihak terkait dengan analisis factor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pariaman selama periode 2002-2011.